

## Said Tuhuleley: Teologi Al Ma'un Kyai Dahlan Bukan Sekedar Gerakan Individu

Sabtu, 28-07-2012

**Yogyakarta-** Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Said Tuhuleley mengungkapkan, K.H. Ahmad Dahlan mengembangkan gerakan dakwahnya dengan memadukan pemahaman terhadap nilai Ilahiah dan pemahaman terhadap manusia. Gerakan dalam telogi Al-Maun yang sering disuarakan Ahmad Dahlan, bukanlah perilaku individu yang memberi makan kepada mereka yang kekurangan, tetapi gerakan kolektif yang dilandasi spirit Ketuhanan.

“(gerakan kolektif) Inilah yang menjadi dasar kelahiran Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO),” jelasnya dalam materi yang disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung AR Fakhruddin A Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jum’at (27/07/2012). Said Tuhuleley kemudian memetakan permasalahan kemiskinan tersebut disebabkan oleh tiga domain utama. Pertama, faktor luar yaitu tekanan dari globalisasi dan neliberalisme yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keadilan-kemanusiaan. Kedua, faktor internal yang disebabkan oleh bercokolnya para komprador, kebijakan publik yang tidak pro rakyat, kultur yang minimalis dan keterbatasan pengetahuan para pekerja sosial terhadap masalah publik. Sedangkan yang ketiga, adalah kondisi masyarakat itu sendiri terutama didominasi oleh ketidakmampuan dan daya saing yang lemah, posisi tawar yang lemah, lembaga dan artikulasi serta jaringan yang lemah. “Para petani pada saat menjelang masa tanam, kebutuhan produksi petani ditentukan oleh para pedagang. Demikian juga pada saat panen, harga panen petani ini juga ditentukan oleh para pedagang dansayangnya banyak pedagang tengkulak yang seringkali memperdayai,” jelasnya.

Sementara itu menurut ketua PP ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini, dalam kajian ilmu sosial, kaum Mustadafin ini disebut kelompok marginal, yang di dominasi oleh para buruh, pekerja sektor domestik seperti pembantu rumah tangga, petani dan nelayan. “Penduduk miskin tersebut lahir dari kebijakan pembangunan yang salah arah, kebijakan yang tidak berpihak dan melindungi baik secara struktural dan kultural, termarginalisasi di bidang pendidikan, ekonomi, sosial serta politik secara luas, dan akses terhadap publik dan hukum,” tegasnya. Sementara itu MPM PP Muhammadiyah dan Aisyiyah telah memulai melakukan pemberdayaan bagi para TKI di luar negeri, dengan mulai pelatihan terhadap para buruh migran di Kuala Lumpur, Malaysia.